



## **Peranan Kepala Desa pada Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**

### ***The Role of the Village Head in Road Infrastructure Development in Pulau Sejuk Village, Datuk Limapuluh District, Batu Bara Regency***

**Arifah, Budi Hartono\* & Marlina Deliana**

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Pembangunan infrastruktur merupakan hal krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa berpengaruh besar terhadap infrastruktur jalan di Desa Pulau Sejuk. Karena sebagian jalan masih rusak, peneliti tertarik untuk memahami Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Pulau Sejuk dan menggambarkan faktor-faktor pendukung serta penghambat Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Soekanto dan Sulistyowati (2017), yang memfokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis kualitatif menurut metode Sugiyono (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan telah direncanakan dengan baik, namun pelaksanaannya masih tertunda. Pengawasan langsung maupun tidak langsung oleh kepala desa dan aparat desa dalam pembangunan jalan belum terlaksana karena belum dilakukannya perbaikan jalan. Kepala Desa Pulau Sejuk perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan jalan untuk memastikan kelancaran infrastruktur.

**Kata kunci:** Peranan; Pembangunan; Infrastruktur Jalan

#### **Abstract**

*Infrastructure development is crucial in fostering economic growth. The development undertaken by the village government significantly influences the road infrastructure in Pulau Sejuk Village. With several damaged roads, the researcher was intrigued to explore the Role of the Village Head in Road Infrastructure Development in Pulau Sejuk Village and delineate the supporting and inhibiting factors of the Village Head's Role in Road Infrastructure Development. To address the research questions, the researcher employed Soekanto and Sulistyowati's (2017) theory, emphasizing planning, implementation, and monitoring. Data collection involved interviews, observations, documentation, and qualitative analysis following Sugiyono's (2010) methodology. The findings reveal that the village head's role in planning road infrastructure development has been well laid out, but its execution is pending. Direct or indirect supervision by the village head and village apparatus in road development has yet to materialize due to the absence of road repairs. The Village Head of Pulau Sejuk needs to pay closer attention to road development to ensure smooth infrastructure implementation.*

**Keywords:** Role; Development; Road Infrastructure

**How to Cite:** Arifah, Hartono, B., & Deliana, M., (2024), Peranan Kepala Desa pada Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 6(2) 2024: 136-142



## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara telah memperlihatkan upaya yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang matang sangatlah krusial dalam proses pertumbuhan ekonomi karena berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan infrastruktur yang solid akan menjamin efisiensi serta kelancaran pergerakan barang dan jasa. (Soekanto & Mamudji, 2005) menjelaskan bahwa peranan merujuk pada konsep tindakan individu di dalam organisasi dan pentingnya perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat. Dalam konsep tersebut, terdapat tiga indikator peranan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan tahapan menentukan tindakan masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara pelaksanaan merupakan usaha untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan, dan pengawasan adalah proses menetapkan kinerja dan menunjang hasil yang diharapkan sesuai rencana.

Peran pemimpin mencakup kemampuan teknis dan sosial dalam mengarahkan, mendorong, dan menerapkan praktik kehidupan dan organisasi. Ini melibatkan pemikiran, perilaku sehari-hari, dan penggunaan alat. Aspek teknis kepemimpinan meliputi etika profesi, kebutuhan dan motivasi manusia, dinamika kelompok, komunikasi, pengambilan keputusan, keterampilan diskusi, dan lainnya (Anastacia et al., 2021). Pendekatan dan prinsip-prinsip pembangunan desa haruslah menyeluruh, terpadu, terkoordinasi, dinamis, serta berkelanjutan, sejalan dengan keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dan Masyarakat (Ibad & Djafar, 2023; Windy et al., 2023). Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan suatu daerah. Menurut (Kartono, 2002), dalam wilayahnya, kepala desa bertindak sebagai perencana, pengawas, pelopor, dan dinamisator. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa atau posisi serupa, dengan bantuan perangkat desa, sebagai pelaksana pemerintahan desa. Selain itu, Kepala Desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Ilmiah, Publik, Ginting, et al., 2023; Jannah et al., 2022; Kadri Pratiwi et al., 2021). Era reformasi telah menghadirkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terutama sejak penerapan otonomi daerah. Hal ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya masing-masing, mempertegas pentingnya peran perencanaan (Rosaki, Abdur, Anang Sabtoni, Arie Sujito, Joko Purnomo, Muslichah Setiasih, Sunaji, Zamroni, 2005; Soni, 2023).

Pembangunan merupakan realisasi dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi janji-janji politik yang telah diutarakan pada berbagai kesempatan, terutama saat pemilihan Pemimpin Daerah dan anggota legislatif. Setiap pemimpin memiliki peran yang signifikan dalam mengatur serta memotivasi organisasi yang dipimpinnya, memberikan arahan kepada bawahan, dan menjalankan tugas kepemimpinan (Halawa & Batubara, 2022; Rizam et al., 2021). Desa memiliki hak untuk mewujudkan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat. Sebab, desa dengan infrastruktur yang memadai akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan desa yang kekurangan infrastruktur yang mendukung aktivitas Masyarakat (S et al., 2019; Sitepu et al., 2019).

Kunci keberhasilan pembangunan, terlepas dari skala ukurannya, sangat tergantung pada kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Infrastruktur menjadi instrumen krusial dalam pembangunan yang harus disediakan oleh pemerintah karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi mereka (Ilmiah, Publik, Arjuna, et al., 2023; Nur et al., 2023; Pandiangan et al., 2019). Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari seberapa baik infrastruktur telah dibangun untuk kepentingan masyarakat sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah (Berutu et al., 2019; Ibad & Djafar, 2023; Wulandari et al., 2021).

Oleh karena itu, peran Kepala Desa Pulau Sejuk dalam pembangunan infrastruktur jalan merujuk pada sistem fisik yang memberikan akses transportasi, pengairan, drainase, serta fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pembangunan fasilitas publik yang memadai dapat meningkatkan perekonomian, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pulau Sejuk merupakan salah satu desa di kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Indonesia. Pada tahun 1955, Pulau Sejuk masih menjadi bagian dari

wilayah Pemerintahan Desa Lubuk Besar sebelum mengalami pemekaran. Di Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Kepala Desa memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola infrastruktur desa, perekonomian, dan pemerintahan yang efektif.

Pada Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, perkembangan infrastruktur jalan masih belum merata, dengan sejumlah ruas jalan yang rusak. Panjang jalan yang membutuhkan perbaikan meliputi bagian jalan sepanjang 500 meter hingga ke persimpangan menuju Dusun Pajak Rabu, dengan estimasi total sekitar 1.648 meter. Perbaikan ini diharapkan untuk menghasilkan kondisi jalan yang optimal, menjadi penentu penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, menggantungkan harapannya pada peran Kepala Desa sebagai motor penggerak dalam mencapai tujuan yang lebih baik. Kerjasama antara Kepala Desa dan masyarakat menjadi kunci utama dalam kesuksesan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur telah menunjukkan kinerja yang baik, namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Sugiyono, 2019). Penelitian oleh Wawan (2021) di Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, mengungkapkan bahwa Kepala Desa belum optimal dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, menyebabkan beberapa program pembangunan belum terselesaikan tepat waktu. Meskipun pembangunan dilakukan sesuai rencana, koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa yang digunakan belum optimal. Di Desa Pulau Sejuk, perbaikan infrastruktur jalan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi bagian integral dari pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Adapun implementasi otonomi daerah terbukti melalui upaya pemerintah daerah dalam memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur (Wawan, 2021).

Penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan oleh Wawan (2021), mengungkapkan bahwa Kepala Desa Pulau Busuk belum sepenuhnya mampu menunjukkan perannya dalam merencanakan pembangunan jangka menengah di desa. Akibatnya, sejumlah program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) masih belum terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Meskipun Kepala Desa sudah memainkan perannya dengan cukup baik dalam menyusun rencana pembangunan, namun koordinasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk infrastruktur belum dilakukan secara optimal. Dalam konteks ini, pengawasan langsung dari Kepala Desa terhadap lokasi pembangunan infrastruktur belum terlaksana dengan efektif, menandakan ketidakefektifan peran dalam mengawasi proses Pembangunan (Wawan, 2021).

Sementara itu, penelitian lain oleh Indrasto Wahyudi Dahlan (2012) tentang Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah aktif memfasilitasi beberapa aspek terkait dengan program pembangunan. Terdapat indikator keberhasilan yang menunjukkan aktifitas Pemerintah Desa dalam memberikan fasilitas pada forum musyawarah desa, mendorong transparansi dalam pelaksanaan, serta menyediakan sarana pendukung untuk kegiatan Otonomi Masyarakat Sekitar (OMS). Melalui keterlibatan masyarakat, pihak Pemerintah Desa berupaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan program PPIP. Meskipun demikian, peran Kepala Desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pulau Sejuk masih terhambat oleh kurangnya kerjasama antara masyarakat setempat, Kepala Desa, dan aparat desa. Kelangkaan dana juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya perbaikan jalan desa, yang pada gilirannya menghambat aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Wawan, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan fakta dan keterangan yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif menitikberatkan pada data dalam bentuk deskriptif seperti kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak diolah melalui proses statistik. Penelitian kualitatif sering diasosiasikan dengan metode penelitian naturalistik atau etnografi karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2017).

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara atau pengisian kuesioner, yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sedangkan, data sekunder diperoleh tidak langsung melalui dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk generalisasi atau menghasilkan temuan yang bisa diterapkan secara umum. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, konsep populasi dan sampel tidaklah relevan (Suyanto & Sutinah, 2011). Subjek penelitian menjadi informan yang memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan merupakan individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait suatu persoalan atau permasalahan tertentu, memberikan informasi yang akurat dan membantu dalam pemahaman masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yang terdiri dari sejumlah individu dengan peran yang berbeda. Informan kunci meliputi Bapak Siswanto S.Pd.I, yang menjabat sebagai Kepala Desa, serta Bapak Yofrizal Sidik, S.I.Pust, yang menempati posisi Sekretaris Desa. Sementara itu, informan utama meliputi Riswanda, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintah), Sri Wahyuni, S.Pd, sebagai Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan), dan Jeni Rifal Nst, S.Agt, yang menempati posisi Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan). Selain itu, terdapat informan tambahan, yaitu Dedi, Sawal, dan Julpan, yang merupakan anggota masyarakat dari Desa Pulau Sejuk.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini menggambarkan informasi yang ada di lapangan, menitikberatkan pada karakteristik objek penelitian dalam bentuk kata-kata, gambar, dan data deskriptif yang tidak melalui analisis statistik (Suyanto & Sutinah, 2011). Informasi dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pulau Sejuk.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**

Hasil temuan dari penelitian lapangan terkait dengan peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, mengacu pada teori (Soekanto, 2002) tentang peranan. Dalam konteks ini, terdapat tiga indikator peran yang menjadi fokus utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dalam pembangunan infrastruktur jalan diarahkan pada proses menentukan langkah-langkah ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, peran Kepala Desa memerlukan upaya konkret untuk merealisasikan rencana atau program yang telah disusun ke dalam kenyataan. Sementara pengawasan menjadi tahap penting dalam menetapkan standar kinerja yang mendukung pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hal yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa Kepala Desa telah melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya, proses pembangunan jalan masih belum sepenuhnya terlaksana. Pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Desa beserta aparat desa, belum optimal dalam proses pembangunan jalan karena masih terdapat sejumlah ruas jalan yang rusak dan belum mendapat perbaikan. Meskipun perencanaan telah tersusun dengan matang, penelitian menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### **1. Perencanaan**

Berdasarkan temuan di lapangan terkait dengan aspek perencanaan, Kepala Desa Pulau Sejuk telah menunjukkan kemampuannya dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Meski begitu, terdapat catatan bahwa program RPJM Desa, yang menjadi bagian integral dari rencana tersebut, belum terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan dalam menyelesaikan program-program ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara target yang direncanakan dan realisasi di lapangan.

Dalam konteks ini, evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sangatlah penting. Hal ini memerlukan analisis yang cermat terkait dengan faktor-faktor apa yang

mungkin menjadi penyebab dari ketidaktepatan waktu penyelesaian program-program tersebut. Evaluasi tersebut dapat membantu pemerintah Desa Pulau Sejuk untuk meninjau kembali strategi, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar pelaksanaan program-program pembangunan di masa depan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah berjalan dengan baik dengan memantau pembangunan yang sesuai dengan RKP Desa dan melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya. Kepala Desa Pulau Sejuk sudah melakukan koordinasi dengan BPD Desa Pulau Sejuk tetapi dalam pelaksanaan belum maksimal masih perlu melakukan evaluasi kembali. Berdasarkan hasil penelitian lapangan terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, dapat diamati bahwa Kepala Desa Pulau Sejuk telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memantau jalannya proses pembangunan yang sesuai dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa. Selain itu, terlihat adanya upaya koordinasi yang telah dilakukan dengan perangkat desa lainnya, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Sejuk.

Meski demikian, terdapat catatan bahwa meskipun koordinasi sudah dilakukan, pelaksanaan dari koordinasi ini masih belum mencapai tingkat maksimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam terkait dengan proses koordinasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi yang ada serta mencari cara-cara untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama antara Kepala Desa dan BPD Desa Pulau Sejuk agar mencapai tujuan yang diinginkan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperbaiki proses pelaksanaan dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

## **3. Pengawasan**

Untuk pengawasan tidak langsung dilakukan, Kepala Desa meminta laporan keaur perencanaan hal ini dilihat dari belum adanya laporan secara tertulis yang diterima oleh Kepala Desa atas pembanguann infrastruktur. Sedangkan evaluasi belum dilakukan kembali karena masih melakukan kegiatan sosial untuk lansia dan anak yatim

Dalam konteks pengawasan pembangunan infrastruktur jalan, terdapat catatan bahwa pengawasan tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa Pulau Sejuk. Sebagai gantinya, Kepala Desa meminta laporan kepada Kepala Urusan Perencanaan terkait dengan kemajuan pembangunan. Namun, terdapat kekurangan dalam hal ini karena belum ada laporan tertulis yang diterima oleh Kepala Desa mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, evaluasi terkait dengan pembangunan infrastruktur juga belum dilakukan kembali oleh Kepala Desa. Ini disebabkan oleh fokus Kepala Desa dalam menjalankan kegiatan sosial, seperti kegiatan untuk lansia dan anak yatim. Meskipun kegiatan sosial ini memiliki tujuan yang sangat baik, namun keseimbangan antara menjalankan kegiatan sosial dan menjalankan tanggung jawab terkait pengawasan pembangunan infrastruktur perlu dipertimbangkan. Evaluasi yang berkala dalam pengawasan pembangunan sangat penting guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## **Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Dan Menghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**

Faktor Pendukung Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan: **Keterlibatan Masyarakat dan Perangkat Desa:** Terdapat keterlibatan yang kuat dari perangkat desa, seperti perangkat dusun, BPD, dan Pengawas Desa, yang terus berkolaborasi untuk mendukung dan mengawasi proses pembangunan infrastruktur jalan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan rencana-rencana pembangunan dapat terlaksana dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. **Pengawasan Kepala Desa:** Kepala Desa melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan jalan. Meskipun belum dilakukan kembali setelah dampak pandemi COVID-19, pengawasan tetap dilakukan secara langsung ke lapangan, menunjukkan komitmen untuk memantau pembangunan infrastruktur jalan

Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan: **Keterbatasan Anggaran:** Terdapat kendala finansial yang signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran di masa pandemi COVID-19. Banyaknya alokasi anggaran untuk program bantuan COVID-19 dan program desa mandiri menyebabkan keterbatasan dana untuk

pembangunan infrastruktur jalan. **Kurangnya Pemahaman dan Komunikasi dalam Perencanaan:** Misskomunikasi dan kurangnya pemahaman di antara perangkat desa terkait rencana pembangunan infrastruktur jalan menjadi kendala utama. Kurangnya kesadaran akan rencana pembangunan dan kurangnya komunikasi yang baik antara kepala desa dan perangkat desa adalah faktor penghambat dalam perencanaan yang efisien. **Prioritas Program Desa:** Fokus pada program bantuan COVID-19 dan program desa mandiri menyebabkan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan belum bisa dilaksanakan kembali dengan maksimal. Hal ini menyebabkan keterbatasan alokasi dana untuk pembangunan jalan desa.

## SIMPULAN

Hasil analisis dari tiga indikator peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pulau Sejuk menunjukkan beberapa temuan krusial. Meskipun perencanaan pembangunan jalan telah diatur dengan baik, kenyataannya pelaksanaan pembangunan masih tertunda, sementara pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kepala desa bersama aparatur desa, belum dilaksanakan karena belum adanya perbaikan jalan yang seharusnya dilakukan.

Faktor-faktor pendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan melibatkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk perangkat desa, pengawas desa, tokoh masyarakat yang mendukung proses pelaksanaan, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur. Namun, terdapat sejumlah faktor penghambat yang mengganggu keseluruhan proses ini, seperti minimnya komunikasi yang efektif antara kepala desa dengan perangkat desa dalam perencanaan, keterbatasan anggaran dana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan, dan belum adanya pembangunan infrastruktur jalan sehingga pengawasan pembangunan belum dapat dijalankan.

Temuan ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih efektif dan komunikasi yang jelas di antara kepala desa, perangkat desa, dan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sesuai rencana yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Sejuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastacia, D., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2021). Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berbasis Kebutuhan The Role of Motivation in Improving Employee Performance Based on Requirements. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September), 176–184. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.748>
- Berutu, B. R., Nasution, M. A., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.1>
- Halawa, D. K., & Batubara, B. M. (2022). Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat Effectiveness Performance Of Employees In The Field Of Social Development An. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2), 138–144. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1409>
- Ibad, S., & Djafar, F. (2023). Kepemimpinan Inovatif Kepala Daerah Dalam Implementasi Inovasi Smart Kampung. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 65–77. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v5i1.1622>
- Ilmiah, J., Publik, A., Arjuna, P., Kadir, A., & Angelia, N. (2023). Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan pada Masyarakat Desa di Desa Silumajang Kecamatan Na . IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Analysis of The Performance of The Village Apparatus In Service to the Village Community In Silumajang Village Na . IX-X Labuhanbatu Utara District. 2(1), 18–24. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.769>
- Ilmiah, J., Publik, A., Ginting, L. N., Kadir, A., & Angelia, N. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Leadership of the Village Head in Improving Performance at the Sukamaju Village Office , Sunggal District , Deli Serdang Regency. 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.767>
- Jannah, N., Muda, I., & Jamil, B. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) Implementation of Education Family Pogram (PKH) Policy in The Field of Education (Case Study in the Urban Village of

- Matsum IV, Medan Area). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.774>
- Kadri Pratiwi, A., Masitho Batubara, B., & Nasution, I. (2021). Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan The Role Of The Cleaning And Gardening Services In The Management Of A Green Open Space In Medan City. *Oktober*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.773>
- Kartono, K. (2002). Psikologi Sosial Untuk Manajemen dan Industri. *Jakarta: Rajawali*.
- Nur, D., Saragih, U., Kadir, A., Sembiring, W. M., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., & Politik, I. (2023). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan ( JIAAP ) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan The Effectiveness Of Management Of Village Fund Allocation In 2017 In The Effort Of Improving Community Welfare In Hessa Village , Perlompongan , Air Batu District , Asahan Regency*. 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.778>
- Pandiangan, A., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau The Role of Public Order Agency Corp in Controlling Illegal Building at Sinembah Sub-district Rogan Hilir of Riau Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 62–68.
- Rizam, T., Siti, N., & Siregar, S. (2021). Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur The Role of Bappeda in Participatory Development Planning In East Aceh District membantu bupati kepala daerah dalam. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 57–64. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.721>
- Rosaki, Abdur, Anang Sabtoni, Arie Sujito, Joko Purnomo, Muslichah Setiasih, Sunaji, Zamroni, S. E. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE Press.
- S, A. R., Kadir, A., & Angelia, N. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Analysis of Community Sat isfaction Village Head ' s Service of Medan Estate On The District of Percut Sei Tuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 32–38.
- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 54–61.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soni, A. P. (2023). *PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Sugiyono. (2017). *Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Revisi)*. Kencana.
- Wawan, W. (2021). *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Riau.
- Windy, D., Manik, A., Suharyanto, A., & Lubis, Y. A. (2023). *Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Performance Analysis of State Civil Servants in the General Section of the Regional Secretariat o*. 5(1), 46–53.
- Wulandari, R., Kadir, A., & Arief, Y. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa The Role Off the Village Consultative Body in the Management of Village Funds. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September), 150–155. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.744>